

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DAERAH
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh :
Rizqi Febrian Aji
NIM: 31402400042**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah)**

Pra Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Akuntansi



**Disusun Oleh :
Rizqi Febrian Aji
NIM: 31402400042**

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah)**

Disusun Oleh :

Rizqi Febrian Aji

NIM : 31402400042

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan kepada

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 14 Agustus 2025

Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing,



Provita Wijayanti, S.E., M.Si, Ak., CA., AWP., Ph.D.

NIK. 211403012

Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si, Ak., CA.

NIK. 211402010

LEMBAR PENGESAHAN

Usulan Penelitian untuk Skripsi

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

**(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah)**

Disusun Oleh :

Rizqi Febrian Aji

NIM : 31402400042

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 14 Agustus 2025

Pembimbing,



Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA

NIK. 211402010

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizqi Febrian Aji
NIM : 3140240042
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

**“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

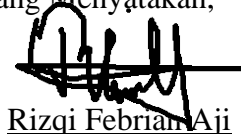
**(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah)”**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang,

Yang Menyatakan,



Rizqi Febrian Aji

NIM. 31402300067

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)”**

Laporan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Selama proses bimbingan proposal skripsi peneliti mendapatkan motivasi, serta dukungan dari pihak lain, oleh sebab itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. Tuhan seluruh alam yang telah memberikan ilmu dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan kemudahanNya.
2. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Ibu Dr. Hj. Indri Kartika, S.E., M.Si.Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyusun proposal penelitian ini,

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengajaran bekal ilmu pengetahuan serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan proposal penelitian ini hingga selesai,
6. Bapak, Ibu, keluarga dan teman teman tercinta atas segala doa, perhatian, dukungan, yang tulus selama ini.
7. Seluruh staff Sub Bagian Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan semangat dan dorongan serta doa selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis masih memerlukan berbagai saran dan kritik dari pembaca. Penulis berharap besar agar skripsi ini dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi pihak yang memerlukan

Semarang,

Penulis,

Rizqi Febrian Aji

NIM. 31402400042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II	11
2.1 Kajian Pustaka	11
2.1.1 Stewardship Theory	11
2.1.2 Teori Good Governance	11
2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	13
2.1.4 Pengendalian Internal	16
2.1.5 Kualitas Sumber Daya Manusia	19
2.1.6 Kejelasan Sasaran Anggaran	19
2.1.7 Sistem Pelaporan	20
2.1.8 Anggaran Daerah Berbasis Kinerja	22
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Pengembangan Hipotesis	33
2.3.1 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	33

2.3.2	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	34
2.3.3	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	35
2.3.4	Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	36
2.3.5	Pengaruh Anggaran Daerah Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	37
2.4	Kerangka Penelitian.....	38
BAB III.....		87
3.1	Jenis Penelitian	87
3.2	Populasi dan Sampel	88
3.2.1	Populasi Penelitian	88
3.2.2	Sampel Penelitian	88
3.3	Jenis dan Sumber Data	88
3.4	Metode dan Pengumpulan Data	89
3.5	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	89
3.5.1	Variabel Independen (X)	89
3.5.2	Variabel Dependen (Y).....	89
3.6	Teknik Analisis Data.....	93
3.6.1	Uji Statistik Deskriptif	93
3.6.2	Uji Validitas	93
3.6.3	Uji Reliabilitas	93
3.6.4	Uji Asumsi Klasik	94
3.6.5	Analisis Regresi Linear Berganda	95
3.6.6	Uji Hipotesis	96
BAB IV		87
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	87
4.2	Uji Statistik Deskriptif	90
4.3	Analisis Data	93
4.3.1	Hasil Uji Validitas.....	93
4.3.2	Hasil Uji Reliabilitas.....	95
4.3.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	96
4.3.4	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	100
4.3.5	Hasil Uji Hipotesis	102
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	87

4.4.1	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	87
4.4.2	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	88
4.4.3	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	89
4.4.4	Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	90
4.4.5	Pengaruh Anggaran Daerah Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	91
BAB V PENUTUP		87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Keterbatasan Penelitian	88
5.3	Saran Penelitian	89
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN		92



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2. Variabel dan Indikator	89
Tabel 3. Pengukuran Skala Likert.....	92
Tabel 4. Statistik Deskriptif	91
Tabel 5. Hasil Uji Validitas.....	94
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas.....	95
Tabel 7. Uji Normalitas.....	96
Tabel 8. Uji Multikolineraitas.....	97
Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas	98
Tabel 10. Tabel hasil uji glejser dengan metode WLS variabel X3	99
Tabel 11. Tabel hasil uji glejser dengan metode WLS variabel X4	99
Tabel 12. Regresi Linear Berganda.....	100
Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi	102
Tabel 14. Uji F.....	103
Tabel 15. Uji t	104



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	38
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Uji Penelitian	92
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Entitas pemerintah merupakan institusi sektor publik yang mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan untuk masyarakat demi tercapainya kesejahteraan di berbagai sektor, diantaranya adalah bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, keamanan dan lain sebagainya. Pemerintah memiliki tuntutan besar atas akuntabilitas pertanggungjawaban kinerjanya kepada masyarakat sejalan dengan perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia (Moersiya & Huseno, 2023). Laporan yang disusun oleh pemerintah merupakan wujud akuntabilitas kinerja pemerintah yang memegang peran utama untuk merawat kredibilitas bagi masyarakat, mencegah penyalahgunaan keuangan, dan memenuhi cita-cita pembangunan (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, telah dirancang berbagai peraturan yang bersangkutan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan tersebut disusun dengan tujuan untuk menciptakan konsep akuntabilitas kinerja yang nyata dalam pemerintahan (Simanjuntak et al., 2023).

Peraturan-peraturan yang ada tersebut dimaksudkan agar setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah wajib bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi yang dijalankannya dengan pengelolaan sumber daya yang telah

ditetapkan pada masing-masing instansi. Pertanggungjawaban diatas adalah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam menuju transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah perlu didukung dengan pengendalian internal yang memadai. Integrasi antara pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi akan menciptakan output informasi keuangan yang berkualitas sesuai dengan prinsip relevan, andal , tepat waktu, akurat, lengkap (Gunawan & Sujana, 2023). Lemahnya pengendalian internal dapat berujung pada abainya kedisiplinan pemerintah daerah, kurangnya kompetensi akibat komitmen yang tidak kuat, identifikasi risiko yang tidak ideal, pengawasan aset yang tidak efektif, serta pencatatan transaksi tidak tertib. Dengan pengimplementasian pengendalian internal yang baik, pemerintah diharapkan mampu membangun kepatuhan terhadap peraturan yang menunjang perbaikan kontrol atas kecenderungan sikap oportunistik aparat pemerintah.

Dalam memenuhi komitmen suatu organisasi, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi ketergantungan kinerja baik individu maupun tim salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia. Baik buruknya capaian output Organisasi Perangkat Daerah dapat bergantung pada sumber daya manusia yang dimilikinya sebagai aset dari organisasi tersebut, sehingga kualitas dari SDM harus dikelola dengan baik agar dapat meraih tujuan secara optimal. Berdasarkan pada bkd.jatengprov.go.id Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh predikat “sangat baik” pada Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Tahun 2021 dengan indeks 0.81 dan 2 penghargaan dalam Anugrah Manajemen ASN 2024 dalam Kategori Pengelolaan Kinerja dan Kategori Indeks Implementasi NSPK

(Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) Manajemen ASN. Maka dari itu pentingnya kualitas sumber daya manusia dapat menunjang urusan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, kejelasan sasaran anggaran juga merupakan faktor penting dalam kinerja pemerintah daerah yang berdampak pada baik atau tidaknya kinerja dari suatu instansi pemerintahan. Bersumber dari portal resmi jatengprov.go.id, anggaran pendapatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 naik sebesar 8,67% dari tahun 2022, dan jumlah belanja naik sebesar 9,29%. Terdapat peningkatan dari tahun 2022 ke 2023 terhadap indikator-indikator capaian kinerja dan pembangunan yang telah ditempuh oleh Pemprov Jateng antara lain, menurunnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,44 poin dari 5,57% ke 5,13%, menurunnya rasio gini sebesar 0,404 poin, penurunan tingkat kemiskinan dari 10,93% ke 10,77%, penurunan kemiskinan ekstrim 0,86%, serta tingkat inflasi yang turun sebesar 2,75%. Pada tahun 2023 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi mencapai angka 83,13 atau meningkat 2,82 poin dari tahun 2022, sedangkan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 adalah 68,59 dari tahun sebelumnya yang sebesar 67,53. Dengan demikian, tepatnya sasaran anggaran pada provinsi Jawa Tengah dapat membantu dalam menetapkan kemana tujuan agar anggaran tersebut akan dilaksanakan hingga mencapai sasaran anggaran. Pada penelitian sebelumnya (Fitriyani & Herawati, 2019) mengatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Elemen lain yang dapat berdampak pada akuntabilitas kinerja pemerintah adalah sistem pelaporan. Menurut (Widaryanti & Pancawardani, 2020), mengemukakan bahwa pemerintah dalam menjalankan kewajibannya diharuskan untuk mematuhi akuntabilitas kinerja dengan memerhatikan beberapa aspek antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Bersumber dari BPK Perwakilan Jawa Tengah, seluruh pemerintah daerah yang berada di Jawa Tengah telah menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited tahun 2023, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 memperoleh capaian 109% dengan kategori sangat baik, Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran yaitu Pergub Nomor 53 Tahun 2023, Sistem Pelaporan Online (SiLAP), dan CaLK. Dalam penelitiannya (Azizah, 2020) mengungkapkan bahwa sistem pelaporan yang semakin baik akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan, perangkat daerah tidak terlepas dari anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran daerah berbasis kinerja adalah anggaran yang telah ditetapkan untuk mengintegrasikan setiap pembekalan dana yang disertakan dalam belanja atau pengeluaran dengan outcome yang telah dicapai diantaranya terdiri dari efektivitas, efisiensi, dan ekonomi sebagai alat dalam mencapai tujuan dan sasaran program (Yulia & Ningsih, 2020). Dilansir dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2023 Pemprov Jateng mampu menjaga status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari anggaran berbasis kinerja tersebut, realisasi APBD Jateng TA 2023 dengan rincian

jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp. 78.296.049.245, realisasi belanja Rp. 25.800.341.207.782, dengan defisit sebesar Rp. 430.607.651.107. Untuk jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 1.330.794.071.071, tanpa ada pengeluaran pembiayaan, dengan Sisal Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 900.186.419.964. pada penelitian sebelumnya, (Selviani, 2020a) menyebutkan bahwa ada pengaruh positif antara anggaran daerah berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Penelitian tentang akuntabilitas kinerja pemerintah sudah banyak dibahas di Indonesia namun belum ada yang meneliti pada OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan variabel pengendalian internal, kualitas SDM, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, anggaran daerah berbasis kinerja. Seperti penelitian dari (Simanjuntak et al., 2023) yang membahas akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah di lingkungan BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan variabel pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, anggaran daerah kinerja. Kemudian penelitian dari (Fadila & Budiwitjaksono, 2022) yang membahas analisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kualitas SDM.

Berdasarkan *research gap* dan fenomena yang diperoleh penulis, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan lokasi penelitian pada OPD Pemprov Jateng dan menguji variable independent yaitu pengendalian internal, kejelasan sasaran

anggaran, sistem pelaporan, dan anggaran daerah berbasis kinerja terhadap variable dependent yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang uraian penjelasan yang telah dijabarkan penulis terdorong untuk melakukan penelitian peran pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan anggaran daerah berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)”.

1.2 Rumusan Masalah

Oleh karena itu penelitian ini hendak menguji beberapa persoalan sebagai berikut:

- 1) Apakah Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
- 2) Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
- 3) Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?

- 4) Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?
- 5) Apakah Anggaran Daerah Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

- 1) Menguji secara empiris pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Menguji secara empiris pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
- 3) Menguji secara empiris pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
- 4) Menguji secara empiris pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
- 5) Menguji secara empiris pengaruh Anggaran Daerah Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau referensi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teori terlebih lagi pada pengaruh pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan,

dan anggaran daerah berbasis kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian yang sudah ada serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau literatur bagi penelitian. selanjutnya

2) Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan dan pengalaman dengan membandingkan teori dan praktik yang ada.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar dapat lebih baik.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi mendukung yang dapat dijadikan masukan untuk.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Stewardship Theory*

Stewardship Theory dikemukakan oleh Donaldson & Davis pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa manajemen lebih mengutamakan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi. Dalam teori tersebut dijelaskan tentang sikap atau perilaku manajemen ketika mengambil langkah dan keputusan yang tepat dengan memperhitungkan kepentingan para *stakeholder* internal maupun eksternal sehingga dalam pencapaian tujuannya berorientasi pada kepentingan organisasi (Saputra et al., 2020). Teori ini juga dikenal juga sebagai teori pelayanan atau pengabdian karena berlandaskan dari asas kepercayaan kepada pihak yang mempunyai wewenang. Peran manajemen di dunia organisasi disimbolkan dengan *good steward* yang mengemban tugas dari pimpinan secara penuh tanggung jawab.

Stewardship Theory dapat diadaptasi pada organisasi sektor publik yaitu di pemerintahan (Eksandy et al., 2020). Dalam ruang lingkup pemerintahan, teori tersebut bekerja untuk mendukung aparat atau perangkat organisasi ketika melangsungkan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset yang dibebankan demi keberlanjutan instansi bersangkutan (Aisyah, 2021).

2.1.2 Teori *Good Governance*

Konsep *Good Governance* dipopulerkan pertama kali oleh lembaga internasional seperti *World Bank* dan *United Nations Development Programme*

(UNDP). Secara umum *good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut (Mardiasmo, 2004) *good governance* merupakan suatu gagasan yang berfokus pada prioritas pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik.

Teori *good governance* menekankan bahwa pemerintah tidak lagi memainkan peran secara menonjol, melainkan berorientasi pada tiga pilar negara yaitu pemerintah, sektor swasta (dunia usaha), dan masyarakat. Ketiga pilar negara tersebut patut untuk saling berkolaborasi agar pemerintahan yang baik dapat dicapai (Rosika & Frinaldi, 2023).

Dalam prakteknya, pemerintah perlu menjalankan prinsip-prinsip *good governance* agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. UNDP menyatakan bahwa terdapat 9 prinsip agar *good governance* dapat terlaksana, diantaranya yaitu:

- 1) Partisipasi

Masyarakat mempunyai hak penuh untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bentuk partisipasi tersebut dapat secara langsung dan juga diwakilkan melalui sebuah lembaga perwakilan.

- 2) Penegakan hukum

Semua elemen warga negara baik pemerintah maupun masyarakat wajib patuh terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.

- 3) Transparansi

Publik mempunyai hak dalam mengakses informasi terkait perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan kinerja pemerintah.

4) Daya tanggap

Pemerintah wajib untuk aktif dalam merespon keluhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat memberikan fasilitas pelayanan publik yang baik.

5) Berorientasi pada konsensus

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjembatani diskusi untuk mencapai jalan keluar dari berbagai kepentingan dalam masyarakat.

6) Keadilan atau kesetaraan

Pemerintah dilarang melakukan diskriminasi dan wajib memberikan fasilitas pelayanan yang adil bagi masyarakat.

7) Efektifitas dan efisiensi

Penggunaan sumber daya harus digunakan secara efektif dan efisien agar tujuan pembangunan dapat terpenuhi.

8) Akuntabilitas

Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah mereka buat.

9) Visi strategis

Pemerintah harus dapat mempunyai visi jauh ke depan serta mampu mengambil keputusan strategis mengenai tujuan tersebut.

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan sebuah upaya yang dilakukan baik oleh pribadi maupun instansi/lembaga pemerintah atas otoritas yang ditugaskan kepadanya (Asmawanti et al., 2020). Akuntabilitas tidak hanya didefinisikan sekedar melaporkan pekerjaan yang telah dipenuhi saja, namun juga direfleksikan sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan apa yang tengah dikerjakan (Karima et al., 2021).

Sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, disebutkan bahwa terdapat persyaratan yang harus dipenuhi supaya AKIP dapat terwujud dengan baik:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dari manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat mengacu pada indikator kinerja baik kuantitatif maupun kualitatif yang mengukur tujuan atau capaian *inputs, outputs, process, outcomes, benefits, impacts*.

1. *Input* merupakan standar kinerja yang berlandaskan pada banyak hal seperti sarana dan prasarana, teknologi, biaya, waktu, sumber daya yang menopang jalannya aktivitas pemerintahan.
2. *Output* adalah produk yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan dari input.
3. *Outcome* merupakan tolak ukur kesuksesan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan (*output*).
4. *Benefit* adalah manfaat atau nilai tambah yang dirasakan oleh masyarakat atas produk baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dihasilkan dari program pemerintah.
5. *Impact* adalah seberapa besar dan luas dampak atas manfaat yang telah diterima seluruh masyarakat.

Menurut (Sugiarti et al., 2024) dalam menerapkan akuntabilitas kinerja, pemerintah juga memperhitungkan prinsip *value for money* agar penggunaan anggaran dapat maksimal. Aspek-aspek tersebut yaitu:

1. Mempertimbangkan **ekonomi** saat perencanaan dengan cara mencari input pada harga paling rendah.
2. Memaksimalkan output dari penggunaan sumber daya secara **efisien**.
3. Target yang sesuai dengan tujuan dan sasaran sehingga mencapai **efektivitas**.

Pada Modul BPKP tentang akuntabilitas instansi pemerintah, kinerja pemerintah sebagai wujud dari akuntabilitas dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Terdapat empat unsur yang termuat dalam LAKIP diantaranya:

1. Rencana Strategis (Renstra)

Renstra merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi yang mengandung program, strategi, kebijakan, dan kegiatan dalam periode tertentu. Renstra dibuat untuk jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

2. Rencana Kerja (Renja)

Renja adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode pendek yaitu satu tahun. Renja dirancang oleh perangkat daerah seperti dinas, kecamatan, atau kantor.

3. Pengukuran Kerja

Pengukuran kinerja adalah pendekatan untuk mengukur hubungan antara rencana dengan hasil indikator sasaran dan indikator kegiatan.

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja digunakan untuk mengulas hambatan dalam kegiatan, kemajuan program, realisasi dan target yang telah dicapai agar dapat dilakukan perbaikan.

2.1.4 Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan pernyataan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Mengutip (Li & Zhao, 2024) bahwa untuk menggapai tujuan perusahaan diperlukan keterlibatan pengendalian internal dalam pengelolaan sumber daya yang berfungsi sebagai penyokong, pengontrol, dan pengawas jalannya kegiatan.

Pengendalian internal dapat mencegah terjadinya kecurangan atau *fraud* pada suatu organisasi yang dapat mengakibatkan kerugian. Tujuan dari pengendalian internal menurut (Wijayanti & Setyawan, 2022) antara lain:

1. Pendorong bagi aparat pemerintah daerah atas mandat yang diberikan dalam keandalan informasi keuangan yang berwujud Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara profesional dan hukum, agar informasi tersebut andal, wajar, relevan, dan dapat dipercaya.
2. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud agar sumber daya yang dimiliki dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat secara efektif dan efisien.
3. Sebagai pengingat bahwa segala kegiatan atau aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pada peraturan dan hukum. Terdapat lima unsur atau elemen pengendalian internal yang telah diterapkan di berbagai negara, unsur-unsur tersebut terdiri dari:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan dalam keseluruhan organisasi harus dipelihara oleh pimpinan instansi pemerintah dan pegawai karena dapat berdampak pada perilaku positif dan pengendalian internal yang terdukung, serta manajemen yang sehat.

2. Penilaian risiko

Pengendalian internal perlu menyerahkan penilaian risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari dalam maupun luar.

3. Kegiatan pengendalian

Pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dapat dipastikan dari pengendalian internal. Maka dari itu pengendalian internal harus efektif dan efisien karena berperan signifikan dalam meraih tujuan organisasi.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak luar yang berkepentingan. Informasi disampaikan secara tepat waktu dengan media dan fasilitas yang diperlukan sehingga dapat tertuju pada pimpinan agar memenuhi pengendalian dan kewajibannya.

5. Pemantauan

Nilai-nilai yang harus dilakukan penilaian adalah perkembangan kinerja periode waktu berjalan serta menjamin bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya agar segera ditindaklanjuti.

2.1.5 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai gabungan dari kemampuan fisik (kesehatan jasmani) dan kemampuan non fisik (keterampilan bekerja, inisiatif berpikir, mental, dan kemampuan-kemampuan lainnya) yang dimiliki oleh individu sehingga mereka dapat bekerja, berinovasi, dan mengeluarkan potensinya dalam organisasi (Ananda Lubis et al., 2019).

Menurut (Karendra, 2014) terdapat tiga prinsip yang harus dipenuhi pada pendekatan sumber daya manusia, antara lain:

1. Tenaga kerja adalah elemen investasi efektif apabila dikelola dan diberdayakan dengan baik akan berpengaruh dalam prospek profit jangka panjang dan tingginya produktivitas pada suatu organisasi atau perusahaan.
2. Kebijakan program dan pelaksanaan harus diciptakan untuk menguntungkan kedua pihak, yaitu untuk ekonomi perusahaan dan kesejahteraan karyawan.
3. Kenyamanan pada lingkungan kerja harus diciptakan agar karyawan dapat menyalurkan bakat dan keahliannya secara optimal.

2.1.6 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merujuk pada sejauh mana arah anggaran dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Pada penelitiannya (Oroh et al., 2023) berpendapat bahwa dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, kinerja pemerintah yang diharapkan dapat meningkat. Semua aktivitas yang dijalankan oleh

pemerintah daerah yang bersangkutan dengan penggunaan anggaran diharuskan dapat diukur dan ditunjukkan hubungannya (Manullang & Abdullah, 2019). Terdapat lima elemen sifat tujuan anggaran yang diimplikasikan agar dapat berjalan secara efektif (Marita & Hariani, 2020):

1. Tujuan anggaran (*budgetary goal characteristic*);
2. Kejelasan tujuan anggaran (*budget goal clarity*);
3. Umpan balik anggaran (*budgeting feedback*);
4. Evaluasi anggaran (*budgeting evaluation*);
5. Kesulitan tujuan anggaran (*budgeting goal difficulty*).

Dalam sebuah organisasi, anggaran mempunyai bobot krusial bagi manajemen sebagai dasar acuan perencanaan keuangan, sehingga kinerja dari pemerintah dapat dievaluasi. Pemerintah daerah bertugas mengelola keuangan daerah dari anggaran yang telah diberikan dengan akuntabel, sehingga di kaca mata masyarakat pemerintah serius dalam berupaya menyejahterakan rakyatnya. Kondisi ini dapat dibandingkan dari kemajuan kinerja dari tahun ke tahun untuk menilai apakah tujuan dari penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran (Simanjuntak et al., 2023).

2.1.7 Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 yang berbunyi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan

posisi keuangan, dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pelaporan keuangan daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD dimaksud disusun dan disajikan oleh kepala SKPD yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Mengutip (Simanjuntak et al., 2023) sistem pelaporan sistem pelaporan disusun untuk menyajikan data keuangan yang berbeda. Laporan keuangan bertujuan menguatkan dasar-dasar pengelolaan yang baik dengan menyediakan informasi bagi *stakeholders* terkait kondisi keuangan pemerintah (Simanjuntak et al., 2023)). Sistem pelaporan menghasilkan petunjuk penggunaan anggaran yang telah direalisasikan oleh unit Organisasi Perangkat Daerah sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan otonomi daerah (Mulya & Fauzihardani, 2022).

Sistem pelaporan berjalan dengan baik apabila pada saat berjalannya kegiatan telah terdapat monitoring dan pengendalian sehubungan dengan manajerial dalam pelaksanaannya. Baik pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi penting lainnya yang

diperuntukkan oleh *stakeholders* dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Mulya & Fauzihardani, 2022).

2.1.8 Anggaran Daerah Berbasis Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penganggaran berbasis kinerja mempunyai tujuan untuk mengelola keuangan daerah agar dapat memberikan manfaat yang luas, hal ini didasarkan pada pengeluaran dana yang penggunaannya melalui *output* dan *outcome* (Yulia & Ningsih, 2020). Terdapat komponen anggaran berbasis kinerja yang perlu diperhatikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 antara lain:

1. Indikator kinerja
2. Standar biaya
3. Evaluasi kinerja

Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) penerapan anggaran berbasis kinerja meliputi enam tahapan yaitu:

1. Penyusunan renstra, dilakukan sebelum melakukan penyusunan anggaran berbasis kinerja pada kementerian/lembaga. Substansinya adalah memberikan gambaran tentang tujuan organisasi dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Sinkronisasi tersebut diupayakan untuk:

- a. Membuat alur hubungan antara program dan kegiatan atas pedoman kebijakan yang melatarbelakanginya.
 - b. Menegaskan bahwa aktivitas operasi yang akan dilaksanakan, dipastikan untuk menghasilkan output yang menunjang pencapaian kinerja.
 - c. Meyakinkan bahwa perencanaan yang telah disusun akan menguatkan tujuan kebijakan.
 - d. Memantapkan bahwa program dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) saling terkait.
3. Penyusunan kerangka acuan yang berisi:
- a. Penjelasan definisi kegiatan dan alasan penyebab kegiatan tersebut harus dijalankan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Penanggung jawab dari pengimplementasian atas kegiatan untuk mencapai sasaran output dan siapa yang akan akan menikmati atas layanan kegiatan tersebut adalah Satuan Kerja.
 - c. Uraian pendekatan dan rentang waktu dibutuhkan ketika kegiatan berjalan. Agenda atas kegiatan yang telah direncanakan, serta rincian hubungan siklus pemikiran antara kegiatan dan program yang membawahnya.
 - d. Data sumber daya yang dibutuhkan, termasuk perkiraan biaya yang diuraikan.
4. Penerapan indikator kinerja
- Kriteria penilaian kinerja didasarkan dari komitmen yang menaunginya. Indikator kinerja menunjukkan ilustrasi atas sesuatu yang akan diukur dan meninjau tujuan yang akan dicapai.

5. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai dan menyimpulkan dari kesuksesan maupun kegagalan dari suatu perencanaan dan kegiatan. Oleh karena itu, anggaran berbasis kinerja butuh disokong dengan akuntabilitas kinerja yang memperlihatkan tanggung jawab atas berhasil atau tidaknya visi dan misi organisasi.

6. Pelaporan kinerja

Pertanggungjawaban dari seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi misi organisasi disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan.

Sistem penganggaran berbasis kinerja ini muncul karena masyarakat mulai sadar dan peduli akan kualitas kerja dari pemerintah yang hasilnya cenderung menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Hal tersebut membuat diperlukannya indikator untuk mengukur kinerja terhadap aparat penyelenggara kegiatan. Pengukuran tersebut dikaji dengan menilai bagaimana progress kinerja pemerintah yang dicapai pada periode tertentu dan membandingkannya dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu yang telah didapat menjadi salah satu referensi dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan saat ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian		Sampel dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian
Pratama, et al. (2019)	Variabel Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Dependen: Kinerja	Sampel : 17 1. SKPD di Kabupaten Padang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pengendalian akuntansi pegawai di suatu instansi, maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akan dihasilkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya penyusunan sistem pelaporan yang baik akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kab. Padang Pariaman.
	Variabel Pengendalian Sistem Kejelasan Anggaran	Independen: Akuntansi, Pelaporan, Sasaran	Pariaman, diperoleh 64 kuisisioner Teknik Analisis: uji asumsi klasik dan uji regresi berganda dengan 2. SPSS for windows versi 16	
Isnanto, et al. (2019)	Variabel Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Dependen: Kinerja	Sampel : 17 1. SKPD di Kabupaten Sukoharjo	Hasil penelitian diketahui bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas
	Variabel Kejelasan Anggaran ,	Independen: Sasaran Pengendalian	diperoleh 51 responden	



Akuntansi, Pelaporan,	Sistem	Teknik Analisis: uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda	kinerja instansi pemerintah sehingga H1 terbukti kebenarannya.
			2. Hasil penelitian diketahui bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga H2 terbukti kebenarannya.
			3. Hasil penelitian diketahui bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga H3 terbukti kebenarannya.
Azizah & Widyawati (2020)	Variabel Akuntabilitas Kinerja	Dependen: Sampel : 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya	1. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa H1 yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai signifikansi sebesar $0,027 < 0,05$.
	Variabel Kejelasan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pelaporan	Independen: Sasaran	2. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa H2 yang menyatakan kualitas sumber
		Teknik Analisis: uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji f, uji t	

				<p>daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$.</p> <p>3. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa H_3 yang menyatakan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.</p>
Romenda & Ningsih (2020)	<p>Variabel Pengelolaan Daerah</p> <p>Variabel Anggaran Berbasis Kinerja</p>	<p>Dependen: Keuangan</p> <p>Independen: Anggaran Berbasis Kinerja</p>	<p>Sampel : seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Aceh</p> <p>Teknik Analisis: metode kualitatif deskriptif</p>	<p>Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006</p>
Selviani (2020)	<p>Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi</p> <p>Variabel Anggaran Berbasis Kinerja</p>	<p>Dependen: Kinerja</p> <p>Independen: Anggaran Berbasis Kinerja</p>	<p>Sampel : seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)</p> <p>Teknik Analisis: uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis korelasi spearman rank, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji t</p>	<p>1. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja pada bagian BPKAD Pemerintah Kota Cimahi sudah diterapkan sesuai dengan dengan indikator.</p> <p>2. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan akuntabilitas kinerja bahwa</p>

Aprilianti et,
al. (2020)

Variabel Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di
Kecamatan Wilayah
Jakarta Selatan

Dependen: Kinerja
Kecamatan
Wilayah
Jakarta Selatan

Sampel : 10 kantor
kecamatan
wilayah Jakarta
Selatan

Variabel Kejelasan sasaran
anggaran, pengendalian
internal, sistem pelaporan

Independen: sasaran
anggaran, pengendalian
internal, sistem pelaporan

Teknik Analisis: analisis
regresi linier
berganda, uji
normalitas, uji
multikolinearitas
, analisis
koefisien
korelasi
berganda,
analisis koefisien
determinasi

- pada bagian
BPKAD
Pemerintah Kota
Cimahi sudah
diterapkan sesuai
dengan indikator.
3. Berdasarkan hasil
pengujian yang
telah dilakukan
menunjukkan
bahwa terdapat
pengaruh antara
penerapan
anggaran berbasis
kinerja
berpengaruh
terhadap
akuntabilitas
kinerja.
 1. Dapat dinyatakan
bahwa variabel
Kejelasan
Sasaran
Anggaran
berpengaruh
negatif dan tidak
signifikan
terhadap
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah.
 2. Dapat dinyatakan
bahwa variabel
Pengendalian
Internal
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah.
 3. Dapat dinyatakan
bahwa variabel
Sistem Pelaporan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
Akuntabilitas

Widaryati (2020)	Variabel Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Dependen: Kinerja	Sampel : seluruh (50) SKPD di Kota Semarang	1. Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berarti Hipotesis pertama ditolak 2. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berarti hipotesis kedua diterima. 3. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berarti hipotesis ketiga diterima.
	Variabel Pengendalian Sistem Kejelasan Anggaran	Independen: Akuntansi, Pelaporan, Sasaran	Teknik Analisis: uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi berganda, uji f	



Febriyanti & Yuhertiana (2021)	Variabel Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Dependen: Kinerja	Sampel : 489 pegawai pegawai perangkat daerah di Dinas Daerah Kota Surabaya	1. Diterimanya Hipotesis 1, memberikan makna bahwa dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja menjadi suatu cara dalam mewujudkan
	Variabel Penerapan berbasis kinerja, pada peraturan perundangan, sasaran anggaran	Independen: anggaran ketaatan peraturan ketepatan	Teknik Analisis: uji <i>convergent</i> <i>validity</i> ,	

*discriminant
validity,
reliabilitas,
inner model*

uji
uji

pencapaian
kinerja dimana
dalam sistem
penganggaran
sangat
memperhitunga
n keterkaitan
antara pendanaan
dan kinerja yang
diharapkan, serta
memperhitunga
n efisiensi dalam
mencapai kinerja.

2. Diterimanya
Hipotesis 2,
memberikan
makna bahwa
dengan adanya
ketepatan
sasaran
anggaran yang
jelas dan
spesifik akan
mempermudah
tanggungjawab
pelaksanaan
tugas organisasi
dalam mencapai
tujuan dan
sasaran yang
telah ditetapkan.
3. Diterimanya
Hipotesis 3,
memberikan
makna bahwa
dengan adanya
ketaatan pada
peraturan,
laporan
akuntabilitas
yang dihasilkan
akan tepat dan
sesuai dengan
amanah
konstitusi.



Mulya & Fauzihardani (2022)	Variabel Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Dependen: Kinerja	Sampel : 23 dinas dan 8 badan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Sungai Penuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Sungai Penuh. 2. Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Sistem pelaporan berpengaruh signifikan negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Simanjuntak, et al. (2023)	Variabel Akuntabilitas Lembaga Pemerintah	Dependen: Kinerja	Sampel : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengujian hipotesis 1 (H1) yang menguji pengaruh positif signifikan pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, menyatakan
	Variabel Pengendalian Kejelasan Anggaran, Pelaporan, Daerah Berbasis Kinerja	Independen: Internal, Sasaran Sistem Anggaran	Teknik Analisis: analisis <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) dengan menggunakan paket statistik <i>Smart PLS 3.0. SEM</i>	



- bahwa H1 diterima.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa "Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 3. Hasil pengujian hipotesis H3 dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Hasil pengujian hipotesis H4 menegaskan bahwa "anggaran daerah berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah,"

2.3 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Faktor pengendalian internal mempunyai peluang menggerakkan pegawai dalam meningkatkan produktivitasnya. Seperti contoh, lingkungan kerja yang mendukung, penyelenggara pemerintahan yang bermotivasi tinggi untuk menjaga integritas kinerjanya di instansi pemerintah diciptakan dari lingkungan pengendalian internal yang memadai. Pengendalian internal mempunyai prioritas utama agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disajikan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip akuntansi agar aktivitas operasi yang dijalankan berjalan dengan efektif dan efisien (Siahaan & Simanjuntak, 2020).

Pada penelitiannya (Arifin & Sinambela, 2021) berpandangan bahwa pengendalian internal berpotensi membuat aktivitas agar saling terhubung dalam kegiatan operasi suatu organisasi dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan, mengamankan aset, dan meyakinkan aktivitas organisasi dijalankan sesuai prosedur. Maka dari itu pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Simanjuntak et al., 2023) menunjukkan bahwa pengendalian

internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah di BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Maka hipotesisnya sebagai berikut:

H1: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Kualitas sumber daya manusia merupakan akar mutu dari pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepada individu dengan bekal pengalaman, pengetahuan, Pendidikan, dan pelatihan yang mencukupi (Budiani & Asyik, 2021). Semakin banyak kualitas SDM yang kompeten dan memadai pada sebuah instansi maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Penjabaran tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Azizah, 2020) dengan hasil kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang memadai akan membuat akuntabilitas kinerja pemerintah juga semakin baik. Kualitas sumber daya manusia menjadi penentu bagi suatu organisasi terutama dalam pemerintahan terhadap hasil dan dampak yang akan menjadi pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Maka hipotesisnya sebagai berikut:

H2 : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

2.3.3 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Proses perencanaan anggaran mempunyai kontribusi besar untuk menyajikan informasi penting bagi pengurus pusat yang bertanggung jawab untuk menetapkan penyusunan isi anggaran (Erina & Suartana, 2016). Partisipasi tersebut penting agar para manajer terdorong untuk mencapai keberhasilan sasaran anggaran. Anggaran yang tidak terarah tujuannya, dapat menimbulkan kesulitan dalam perumusan dan pelaksanaannya sehingga dapat menyebabkan kegagalan program (Gunawan & Sujana, 2023).

Maka dari itu perlu adanya rincian tujuan yang terukur untuk membandingkan kemajuan program pemerintah dengan pelaksanaan kegiatannya. Kejelasan sasaran anggaran merujuk pada seberapa jauh anggaran direncanakan dengan spesifik dan jelas, sehingga memberikan pemahaman yang baik kepada pemakai anggaran tersebut untuk bertanggung jawab (Alawiyah et al., 2024). Sasaran anggaran sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah karena sebagai alat atau dasar pengukuran kinerja bagi suatu organisasi. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Azizah, 2020) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas. Selain itu (Febrianti & Indrawati Yuhertiana, 2021) menyebutkan dengan ketepatan sasaran anggaran yang terukur dan spesifik dapat memudahkan

pelaksanaan tugas organisasi untuk meraih tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Maka hipotesisnya sebagai berikut:

H3 : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.4 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pemerintah mempunyai berkewajiban dalam menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat dalam menunaikan hak-haknya. Hak tersebut antara lain kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, hak untuk mengakses informasi, hak untuk meminta penjelasan terkait tanggung jawab, dan hak untuk mendapatkan keterangan. Dengan adanya hal tersebut peran sistem pelaporan ditegaskan agar memicu akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik.

Sistem pelaporan dapat diidentifikasi melalui indikator yang dapat diukur seperti muncul penyimpangan dan asal usulnya, pengambilan langkah, dan jangka waktu untuk memperbaiki (Mulya & Fauzihardani, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan dan andal sistem pelaporan maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja organisasi tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu (Fitriyani & Herawati, 2019) sistem pelaporan mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada penelitiannya (Widaryanti & Pancawardani, 2020) juga menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Maka hipotesisnya sebagai berikut :

H4 : Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.5 Pengaruh Anggaran Daerah Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Turunnya kualitas informasi akuntansi dapat terjadi akibat gagalnya suatu organisasi dalam memanfaatkan penggunaan anggaran daerah berbasis kinerja, yang dapat menyebabkan berbagai kendala. Dampaknya penurunan tersebut sangat berimplikasi krusial pada keabsahan pengambilan keputusan. Pengelolaan keuangan oleh pemerintah dalam penerapan anggaran berbasis kinerja berguna sebagai bahan evaluasi dan penyampaian laporan pada kegiatan dan program pemerintah di periode berjalan (Yulia & Ningsih, 2020).

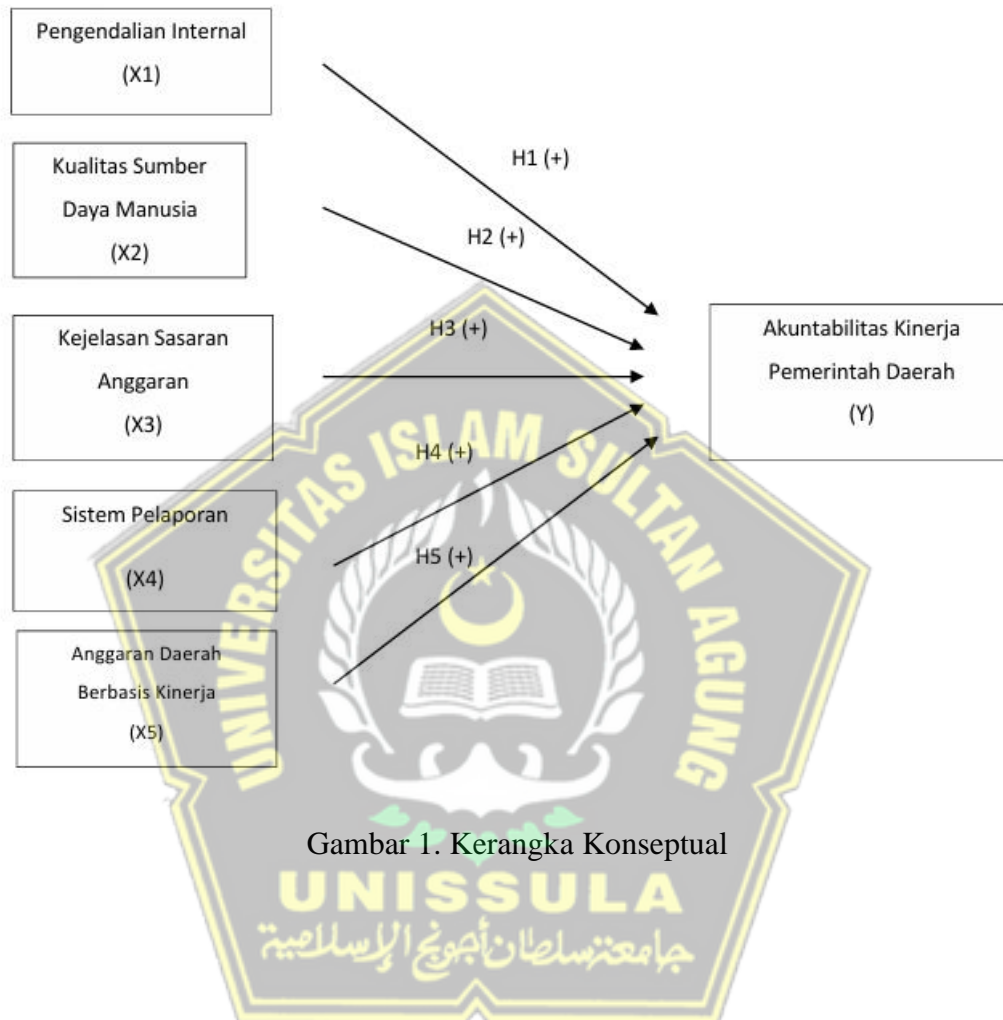
Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Selviani, 2020b) berpendapat bahwa terdapat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja pada akuntabilitas kinerja. Penelitian lain (Biswan & Grafitanti, 2021) juga menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja banyak memberikan dampak positif pada pelaksanaan anggaran KPKNL Palangkaraya.

Maka hipotesisnya sebagai berikut :

H5 : Anggaran Daerah Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka Konseptual:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mempunyai ketentuan yang tersusun, terencana, dan tertata secara jelas dari awal sampai dengan penyusunan konsep penelitiannya (Syahroni, 2022). Menurut (Pratama, 2019). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada filsafat positifisme yang berfungsi untuk menganalisis populasi dan sampel yang digunakan, menggabungkan data pada alat ukur penelitian secara statistik, dengan tujuan untuk mengkaji suatu hipotesis yang akan digunakan.

Dalam penelitiannya (Murjani, 2022) berpendapat bahwa terdapat sepuluh prosedur langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif antara lain:

1. Menentukan masalah
2. Mencari referensi pendahuluan
3. Mengembangkan dan merumuskan masalah
4. Membuat hipotesis
5. Merumuskan metode dan sarana penelitian
6. Menentukan sumber data
7. Menghimpun data
8. Melakukan analisis data
9. Menyusun kesimpulan

10. Membuat laporan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan lingkup generalisasi yang mencakup objek/subjek yang memiliki karakteristik serta kuantitas tertentu yang ditentukan oleh peneliti sebagai bahan untuk dipelajari yang kemudian dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan populasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 42 terdiri dari dinas dan badan. Berdasarkan penelitian terdahulu belum ada yang meneliti tentang pengaruh pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan anggaran daerah berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil populasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari total dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh dengan semua Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan unit alat analisis Pejabat Pengawas Organisasi Perangkat Daerah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung menyajikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini penulis langsung menghimpun seluruh data responden yang disebar melalui kuisioner dengan metode pengumpulan data orisinil. Responden yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Program.

3.4 Metode dan Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner (angket). Kuisioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis secara langsung kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pandangan responden berdasarkan hasil kuisioner. Kuisioner disebarkan melalui media elektronik secara online menggunakan *Google Form*.

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel Independen (X)

Variabel independent merupakan variabel yang menjadi sebab berubahnya atau yang mempengaruhi variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini variabel independent yang digunakan adalah Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja.

3.5.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang muncul disebabkan oleh variabel independent (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 2. Variabel dan Indikator

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Variabel Dependen			
1.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah wujud tanggung jawab dari instansi pemerintah yang berkewajiban menjalankan misi organisasi demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui instrument akuntabilitas secara berkala (Pattinaja, dkk., 2023)	<ol style="list-style-type: none"> Perspektif finansial (<i>financial perspective</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Ekonomis • Efektif • Efisien • Perencanaan terukur • Pertanggungjawaban Transparan dan Akuntabel Perspektif kepuasan pengguna (<i>customer perspective</i>) <ul style="list-style-type: none"> • <i>Customer statisfaction</i> (tingkat kepuasan pengguna) • <i>Customer acquisition</i> (menarik pengguna baru) Perspektif efisiensi proses internal (<i>internal process efficiency</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Siklus layanan • Pengintegrasikan proses pelayanan Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (<i>learning and growth perspective</i>) <ul style="list-style-type: none"> • <i>Employee satisfaction</i> moral pegawai dan Tingkat kepuasan pegawai • Pemberian Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan melanjutkan 90endidikan • Sistem Promosi, Reward dan Punishment <p>(Adhan et al., n.d.) (Busra, 2014b) (Barba-Sánchez dkk., 2024b)</p>
Variabel Independen			

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Pengendalian Internal | Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pengendalian internal adalah seluruh proses penelitian, pengkajian, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pemantauan lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, serta kegiatan organisasi tersebut efektif dan efisien sesuai standar yang ditetapkan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian memadai 2. Penilaian risiko mutu 3. Aktivitas pengendalian 4. Pengendalian informasi dan komunikasi 5. Pemantauan dan evaluasi <p>(Simanjuntak et al., 2023)</p> |
| 2. Kualitas Sumber Daya Manusia | Kualitas sumber daya manusia merupakan gabungan dari kemampuan fisik (kesehatan jasmani) dan kemampuan non fisik (keterampilan bekerja, inisiatif berpikir, mental, dan kemampuan-kemampuan lainnya) yang dimiliki oleh individu sehingga mereka dapat bekerja, berinovasi, dan mengeluarkan potensinya dalam organisasi (Ananda Lubis et al., 2019). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas Kejujuran 2. Profesionalisme 3. Pelatihan 4. Tanggung Jawab 5. Disiplin <p>(Budiani & Asyik, 2021)</p> |
| 3. Kejelasan Anggaran | <p>Sasaran Kejelasan anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan rinci dengan tujuan supaya anggaran tersebut dapat dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan penggunaan anggaran tersebut (Nurmin & Masyita, 2023).</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan anggaran 2. Sasaran prioritas anggaran 3. Kinerja 4. Standar 5. Jangka waktu 6. Tingkat kesulitan koordinasi <p>(Simanjuntak et al., 2023), (Fitriyani & Herawati, 2019)</p> |
| 4. Sistem Pelaporan | Berdasarkan PMK No. 232/PMK.05/2022 sistem pelaporan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana strategis 2. Perjanjian kinerja 3. Pengukuran kinerja 4. Pengelolaan data kinerja 5. Pelaporan kinerja |

- terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga.
5. Anggaran Daerah Berbasis Kinerja Anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan penganggaran manajerial yang mengaitkan biaya yang dikeluarkan oleh organisasi pemerintahan dibandingkan dengan hasil yang dicapai, dengan memanfaatkan indikator kinerja sebagai data (Simanjuntak et al., 2023).
6. Kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku (Fitriyani & Herawati, 2019)
1. Ekonomis
2. Efisien
3. Efektif
4. Pemantauan kinerja (Simanjuntak et al., 2023)

Metode pengukuran variabel menggunakan Skala Likert yang berguna dalam mengukur penerapan Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja. Melalui Skala Likert, maka variabel akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Lalu indikator tersebut akan dijadikan sebagai titik tolak dalam menyusun item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Skala Likert memakai lima pilihan jawaban yang terdiri dari:

Tabel 3. Pengukuran Skala Likert

Jawaban	Skor Pertanyaan	Skor Pertanyaan
	Positif	Negatif
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Kurang Setuju (KS)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau memberikan gambaran data yang telah dihimpun sebagaimana adanya tanpa ada maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019).

3.6.2 Uji Validitas

Uji validitas berfungsi untuk mengukur sah atau tidaknya kuisioner. Suatu kuisioner dapat dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner dapat menyatakan indikator yang akan diukur pada kuisioner tersebut. Menurut Ghozali (2021:66) menentukan dasar analisis untuk pengujian validitas apakah suatu item dikatakan valid atau tidak, dapat dilakukan perbandingan yaitu apabila: (a) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan atau indikator yang digunakan valid, (b) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan atau indikator yang digunakan tidak valid.

3.6.3 Uji Reliabilitas

Pada Reliabilitas adalah instrumen yang digunakan untuk menilai indikator dari variabel atau konstruk yang terdapat dalam kuesioner. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran yang dilakukan. Kuesioner dianggap reliabel atau terpercaya jika jawaban individu terhadap pertanyaan kuesioner tetap konsisten atau stabil seiring berjalannya waktu. Sebuah

konstruk atau variabel penelitian dianggap reliabel jika nilai Alpha Cronbach lebih dari 0,70 (Ghozali, 2021).

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Fungsi uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear adalah untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat-syarat statistik tertentu agar hasil analisisnya valid, reliabel, dan tidak bias. Uji yang dilakukan yaitu:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Studi ini memanfaatkan normal probability plot untuk menganalisis perbandingan antara distribusi kumulatif dan distribusi normal. Model regresi yang efektif dan sesuai dengan asumsi normalitas adalah data yang terdistribusi mengikuti arah garis diagonal dan terletak di garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Penelitian ini menerapkan uji normalitas melalui pendekatan kolmogorov – smirnov (K-S). Populasi bisa dianggap berdistribusi normal jika tingkat signifikansinya 0,05; namun jika kolmogorov-smirnov menunjukkan tingkat signifikansi di bawah 0,05, maka Dapat disimpulkan bahwa data residual tidak terdistribusi secara normal (Ghozali, 2021).

2) Uji Multikolineraitas

Uji multikolineraitas berfungsi untuk menguji pada model regresi apakah ada korelasi antar variabel independennya. Model regresi dinyatakan baik apabila tidak adanya korelasi antar variabel independen. Pengukuran yang digunakan

adalah menggunakan *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dapat dikatakan bebas multikolinearitas dengan syarat sebagai berikut: (a) Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ atau *Value Inflation Factor* (VIF) < 10 maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. (b) Apabila nilai *tolerance* $< 0,10$ atau *Value Inflation Factor* (VIF) > 10 maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan varian dari residual antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya dalam model regresi. Grafik *scatterplot* digunakan untuk mengidentifikasi ada dan tidaknya pola tertentu dalam heteroskedastisitas, dengan ketentuan: (a) apabila terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur seperti melebar, bergelombang, lalu menyempit maka dapat dinyatakan telah terjadi heteroskedastisitas. (b) Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan jika terdapat dua atau lebih variabel independen. Analisis regresi tidak hanya mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih tetapi juga menunjukkan keterkaitan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2021). Bentuk dasar persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

3.6.6 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengamati nilai probabilitas dan t-statistiknya. Pada pengujian hipotesis yang menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang dipakai adalah 1,96. Sehingga kriteria penolakan atau penerimaan H_0 dapat ditentukan menggunakan kriteria uji “t” (I. Ghozali, 2016) sebagai berikut:

- 1) Nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima
- 2) Nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_a tidak diterima.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di tengah Pulau Jawa dengan konfisi geografis berada pada 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur. Jarak terjauh pada Provinsi Jawa Tengah mencakup 263 Km dari Barat ke Timur dan 226 Km dari Utara ke Selatan. Berdasarkan administratifnya, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, dengan luas sebesar 3,25 juta hektar atau kurang lebih 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia). Luas tersebut terbagi menjadi 1,00 juta hektar (30,80 persen) lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,20 persen) bukan lahan sawah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperintah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang mempunyai tujuan dan misi dalam menyediakan layanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor Undang-Undang Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Gubernur didukung oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, pelaksana, dan penunjang. Unsur staf terletak dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diatur dalam Organisasi Perangkat Daerah. Unsur pelaksanaan fungsi pendukung Urusan Pemerintahan Daerah termuat dalam

Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Daerah termuat dalam Inspektorat.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tingkat provinsi merupakan unsur pelaksana pemerintahan provinsi yang membantu Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, serta tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan daerah masing-masing provinsi yang menentukan struktur dan susunan OPD sesuai kebutuhan dan potensi daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta unit dibawahnya memiliki tugas dan fungsi antara lain:

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Provinsi Jawa Tengah, serta melaksanakan kebijakan tersebut dengan mengelola sumber daya dan program yang tepat.

b. Pengelolaan keuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas sebagai pengelola anggaran, termasuk didalamnya pengumpulan pendapatan daerah serta

alokasi dana untuk mendanai berbagai kebijakan dan rencana keuangan Provinsi Jawa Tengah.

c. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tanggung jawab terhadap perbaikan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Provinsi Jawa Tengah seperti transportasi, jembatan, jalan, irigasi, serta fasilitas umum lainnya. Salah satu tujuan dari tugas dan fungsi tersebut agar terciptanya pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan kualitas hidup masyarakat.

d. Pendidikan dan Kesehatan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan dalam memajukan akses dan kualitas pendidikan serta kualitas layanan kesehatan, meningkatkan mutu sekolah, perguruan tinggi, pusat kesehatan, rumah sakit di wilayah Jawa Tengah.

e. Pengembangan ekonomi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai andil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan cara merumuskan berbagai kebijakan yang dapat memberikan fasilitas untuk investasi, pengembangan sektor industri, pariwisata, pertanian, dan perdagangan serta ikut memberikan dorongan bantuan kepada pelaku usaha lokal agar dapat memperkuat perekonomian Provinsi Jawa Tengah.

f. Pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan seperti pemeliharaan sumber daya alam, penanganan limbah, penanggulangan polusi, serta tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

g. Penegakkan hukum dan keamanan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi bersama aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta menjalankan regulasi keamanan publik di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

h. Koordinasi dan hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran sebagai penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya untuk menyelaraskan program dan kebijakan.

4.2 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan pengujian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran data dengan menyajikan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), nilai median, dan nilai standar deviasi terhadap variabel penelitian yang diuji.

Tabel 4. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
X1	103	56.00	70.00	62.8932	.30725	3.11830
X2	103	42.00	55.00	49.3398	.27614	2.80250
X3	103	28.00	35.00	31.3883	.17843	1.81082
X4	103	24.00	30.00	27.0485	.15263	1.54906
X5	103	16.00	20.00	17.9029	.11504	1.16749
Y	103	20.00	25.00	22.5437	.12853	1.30442
Valid N (listwise)	103					

Berdasarkan tabel 4 uji statistik deskriptif yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh data sebanyak 103, data yang telah diolah akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel Independen Pengendalian Internal (X1) memiliki nilai minimum sebesar 56, kemudian nilai maksimum sebesar 70. Lalu nilai rata-rata atau *mean* adalah sebesar 62.8932. Sedangkan untuk nilai dari standar deviasi adalah sebesar 3.11830. Semakin besar standar deviasi, maka semakin besar juga variasi data. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Independen Pengendalian Internal memiliki persebaran yang lebih besar dari variabel lain.
- 2) Variabel Independen Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) memiliki nilai minimum sebesar 42, kemudian nilai maksimum sebesar 55. Lalu nilai rata-rata atau *mean* adalah sebesar 49.3398. Sedangkan untuk nilai dari standar deviasi adalah sebesar 2.80250. Semakin besar

standar deviasi, maka semakin besar juga variasi data. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Independen Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki persebaran yang cukup besar dari variabel lain.

- 3) Variabel Independen Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) memiliki nilai minimum sebesar 28, kemudian nilai maksimum sebesar 35. Lalu nilai rata-rata atau *mean* adalah sebesar 31.3883. Sedangkan untuk nilai dari standar deviasi adalah sebesar 1.81082. Semakin besar standar deviasi, maka semakin besar juga variasi data. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Independen Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki persebaran yang normal.
- 4) Variabel Independen Sistem Pelaporan (X4) memiliki nilai minimum sebesar 24, kemudian nilai maksimum sebesar 30. Lalu nilai rata-rata atau *mean* adalah sebesar 27.0485. Sedangkan untuk nilai dari standar deviasi adalah sebesar 1.54906. Semakin besar standar deviasi, maka semakin besar juga variasi data. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Independen Sistem Pelaporan memiliki persebaran yang normal.
- 5) Variabel Independen Anggaran Daerah Berbasis Kinerja (X5) memiliki nilai minimum sebesar 16, kemudian nilai maksimum sebesar 20. Lalu nilai rata-rata atau *mean* adalah sebesar 17.9029. Sedangkan untuk nilai dari standar deviasi adalah sebesar 1.16749. Semakin besar standar deviasi, maka semakin besar juga variasi data.

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Independen Anggaan Daerah Berbasis Kinerja memiliki persebaran yang normal.

- 6) Variabel Dependen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 20, kemudian nilai maksimum sebesar 25. Lalu nilai rata-rata atau *mean* adalah sebesar 22.5437. Sedangkan untuk nilai dari standar deviasi adalah sebesar 1.30442. Semakin besar standar deviasi, maka semakin besar juga variasi data. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Dependen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah memiliki persebaran yang normal.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif tersebut maka seluruh variabel penelitian mempunyai jumlah data sebanyak 103 observasi tanpa terdapat *missing value*. Rata-rata nilai tiap variabel dapat menunjukkan penyebaran yang wajar pada rentang minimum dan maksimum masing-masing variabel. Standar deviasi tertinggi terdapat pada data variabel X1 dan X2, hal ini berarti bahwa tingkat keragaman data yang relatif lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan pada setiap pertanyaan yang dapat membentuk variabel penelitian. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ atau $\text{sig} < 0.05$, maka item pernyataan valid, jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ atau $\text{sig} > 0.05$, maka item

pernyataan tidak valid. Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan, maka hasil dari uji tersebut dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Signifikan	α	Keterangan
Pengendalian Eksternal (X1)	X1.1	0.603	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X1.2	0.798	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X1.3	0.670	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X1.4	0.719	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X1.5	0.851	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X1.6	0.666	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X1.7	0.738	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X1.8	0.583	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X1.9	0.679	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X1.10	0.457	0.3388	0.007	0.05	Valid
	X1.11	0.818	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X1.12	0.165	0.3388	0.352	0.05	Tidak valid
	X1.13	0.456	0.3388	0.007	0.05	Valid
	X1.14	0.356	0.3388	0.039	0.05	Valid
	X1.15	0.584	0.3388	0.000	0.05	Valid
Kualitas Sumber Daya Manusia (X2)	X2.1	0.850	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X2.2	0.861	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X2.3	0.806	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X2.4	0.880	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X2.5	0.499	0.3388	0.003	0.05	Valid
	X2.6	0.702	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X2.7	0.757	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X2.8	0.804	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X2.9	0.706	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X2.10	0.887	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X2.11	0.722	0.3388	1	0.05	Valid
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	X3.1	0.828	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X3.2	0.817	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X3.3	0.850	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X3.4	0.689	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X3.5	0.567	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X3.6	0.875	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X3.7	0.773	0.3388	0.000	0.05	Valid
Sistem Pelaporan (X4)	X4.1	0.881	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X4.2	0.858	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X4.3	0.797	0.3388	0.000	0.05	Valid

	X4.4	0.861	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X4.5	0.673	0.3388	0.000	0.05	Valid
	X4.6	0.783	0.3388	0.000	0.05	Valid
Anggaran	X5.1	0.862	0.3388	0.000	0.05	Valid
Daerah	X5.2	0.942	0.3388	0.000	0.05	Valid
Berbasis	X5.3	0.679	0.3388	0.000	0.05	Valid
Kinerja (X5)	X5.4	0.568	0.3388	0.000	0.05	Valid
Akuntabilitas	Y.1	0.831	0.3388	0.000	0.05	Valid
Kinerja	Y.2	0.915	0.3388	0.000	0.05	Valid
Pemerintah	Y.3	0.935	0.3388	0.000	0.05	Valid
Daerah (Y)	Y.4	0.883	0.3388	0.000	0.05	Valid
	Y.5	0.715	0.3388	0.000	0.05	Valid

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa hanya terdapat 1 item yang mempunyai nilai r hitung $< r$ tabel atau $\text{sig} > 0.05$, sehingga disimpulkan bahwa 1 item tersebut tidak valid, maka data X1.12 perlu dikeluarkan.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berfungsi untuk memperlihatkan sampai batas mana alat pengukur bisa digunakan agar dapat memberikan jawaban yang konsisten. Jika nilai cronbach's alpha > 0.60 , maka variabel reliabel, jika nilai cronbach's alpha < 0.60 , maka variabel tidak reliabel. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang telah dilakukan, maka hasil dari uji tersebut dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Pengendalian Eksternal (X1)	0.880	0.60	Reliabel
Kualitas Sumber Daya Manusia (X2)	0.931	0.60	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	0.882	0.60	Reliabel

Sistem Pelaporan (X4)	0.884	0.60	Reliabel
Daerah Berbasis Kinerja (X5)	0.756	0.60	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0.901	0.60	Reliabel

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0.60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel sudah reliabel.

4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi variabel dependen dan independent mempunyai distribusi data normal. Selain itu, uji normalitas dapat juga diuji menggunakan analisis statistik yaitu dengan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Perhitungan statistik normalitas dapat dilihat pada hasil berikut:

Tabel 7. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		103
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.76828419
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.065
	Negative	-.062
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.352
	99% Confidence Interval Lower Bound	.339

Upper Bound

.364

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan pada tabel 7 hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorv-Smirnov* dapat dikatakan bahwa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan data terdistribusi normal dan sesuai dengan asumsi normalitas residual berdasarkan pada nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05 maka dari itu model regresi dapat digunakan.

2) Uji Multikolineraitas

Uji multikolineraitas berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier atau korelasi kuat antar variabel independent dalam model regresi. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil uji multikolineraitas pada tabel 8:

Tabel 8. Uji Multikolineraitas

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	X1	.365	2.741
	X2	.216	4.623
	X3	.196	5.091
	X4	.280	3.569
	X5	.398	2.512

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji pada tabel 5 menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai *tolerance value* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 , maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolineritas pada variabel independent yang satu dengan yang lainnya pada model regresi. Hal ini menunjukkan model regresi dapat digunakan

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah varian residual atau kesalahan prediksi pada model regresi bersifat konstan atau tidak. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.095	.961		1.139	.257
	X1	-.014	.024	-.089	-.560	.577
	X2	.056	.035	.325	1.579	.118
	X3	-.167	.057	-.629	-2.914	.004
	X4	.124	.056	.402	2.223	.029
	X5	-.029	.062	-.071	-.465	.643

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X5 mempunyai nilai sig > 0.05 , sedangkan variabel X3 dan X4 mempunyai nilai sig < 0.05 . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X5 lolos uji heteroskedastisitas dan variabel X3 dan X4 tidak lolos uji

heteroskedastisitas. Maka dari itu diperlukan lagi adanya Uji Glejser dengan metode Weight Least Square (WLS) yang berfungsi untuk menyembuhkan variabel data yang tidak lolos uji heteroskedastisitas.

Tabel 10. Tabel hasil uji glejser dengan metode WLS variabel X3

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-.001	.001		.593
	X1_B2	-.020	.026	-.218	.452
	X2_B2	.067	.035	.514	.055
	X3_B2	-.113	.083	-.424	.178
	X4_B2	.117	.057	.491	.042
	X5_B2	-.032	.067	-.091	.630

a. Dependent Variable: ABS_RES_B2

Hasil uji glejser menunjukkan bahwa variabel X3 mempunyai nilai sig 0,178 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X3 lolos uji heteroskedastisitas

Tabel 11. Tabel hasil uji glejser dengan metode WLS variabel X4

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-.001	.001		.633
	X1_B3	-.015	.026	-.181	.555
	X2_B3	.071	.035	.570	.044
	X3_B3	-.168	.057	-.825	.004
	X4_B3	.147	.083	.482	.081
	X5_B3	-.008	.066	-.024	.904

a. Dependent Variable: ABS_RES_B3

Hasil uji glejser menunjukkan bahwa variabel X4 mempunyai nilai sig 0,81 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X4 lolos uji heteroskedastisitas.

4.3.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 12. Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	3.432	1.635		2.099
	X1	.007	.041	.016	.157
	X2	.261	.060	.560	4.358
	X3	.205	.097	.284	2.108
	X4	.090	.095	.107	.949
	X5	-.170	.106	-.152	-1.603

a. Dependent Variable: Y

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

Berdasarkan data yang telah disajikan maka didapat persamaan: $Y = 3,432 + 0,007 X_1 + 0,261 X_2 + 0,205 X_3 + 0,090 X_4 + -0,170 X_5$. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Nilai koefisien konstanta sebesar 3,432 dengan nilai positif, dapat diartikan bahwa jika variabel Pengendalian Internal (X_1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X_2), Kejelasan Sasaran Anggaran (X_3), Sistem Pelaporan (X_4), dan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja (X_5) mengalami peningkatan, maka variabel Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah (Y) akan mengalami peningkatan pula sebanyak 343,2%.

- 2) Nilai koefisien beta variabel Pengendalian Internal (X_1) sebesar 0,007, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) akan mengalami Peningkatan sebesar 0,7%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami penurunan 1%, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,7%.
- 3) Nilai koefisien beta variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X_2) sebesar 0,261, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_2 mengalami Peningkatan 1%, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) akan mengalami Peningkatan sebesar 26,1%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_2 mengalami penurunan 1%, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 26,1%.
- 4) Nilai koefisien beta variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_3) sebesar 0,205, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_3 mengalami Peningkatan 1%, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) akan mengalami Peningkatan sebesar 20,5%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_3 mengalami penurunan 1%, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 20,5%.

- 5) Nilai koefisien beta variabel Sistem Pelaporan (X_4) sebesar 0,090, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_4 mengalami Peningkatan 1%, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) akan mengalami Peningkatan sebesar 9%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_4 mengalami penurunan 1%, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 9%.
- 6) Nilai koefisien beta variabel Anggaran Daerah Berbasis Kinerja (X_5) sebesar -0,170, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_5 mengalami Peningkatan 1%, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) akan mengalami Peningkatan sebesar 17%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_5 mengalami penurunan 1%, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 17%.

4.3.5 Hasil Uji Hipotesis

1) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.808 ^a	.653	.635	.78784

a. Predictors: (Constant), X_5 , X_1 , X_4 , X_2 , X_3

Nilai Adj R square sebesar 0,653 atau 65,3%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengendalian Internal (X_1), Kualitas

Sumber Daya Manusia (X_2), Kejelasan Sasaran Anggaran (X_3), Sistem Pelaporan (X_4), dan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja (X_5) mampu menjelaskan variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) sebesar 65,3% sedangkan sisanya yaitu 34,7% dijelaskan oleh variabel lain.

2) Hasil Uji F

Jika nilai F hitung $> F$ tabel atau $\text{sig} < \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika nilai F hitung $< F$ tabel atau $\text{sig} > \alpha$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Tabel 14. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	113.347	5	22.669	36.523	.000 ^b
	Residual	60.207	97	.621		
	Total	173.553	102			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X_5 , X_1 , X_4 , X_2 , X_3

Rumus F tabel: $F.INV.RT(\text{probability}; \text{deg_freedom1}; \text{deg_freedom2})$

Dengan keterangan sebagai berikut:

- Probability = 0,05
- Deg_freedom1 = Jumlah variabel – 1
- Deg_freedom2 = jumlah sampel – jumlah variabel

Maka diperoleh nilai F tabel 2,31.

Nilai F hitung sebesar $36,523 >$ nilai F tabel yaitu 2,31 dan nilai sig yaitu $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel Pengendalian Internal (X_1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X_2), Kejelasan

Sasaran Anggaran (X_3), Sistem Pelaporan (X_4), dan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja (X_5) berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

3) Hasil Uji t

Jika nilai t hitung > t tabel atau sig < α maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika nilai t hitung < t tabel atau sig > α maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Tabel 15. Uji t

		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3.432	1.635		2.099	.038
	X1	.007	.041	.016	.157	.876
	X2	.261	.060	.560	4.358	.000
	X3	.205	.097	.284	2.108	.038
	X4	.090	.095	.107	.949	.345
	X5	-.170	.106	-.152	-1.603	.112

a. Dependent Variable: Y

Pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Nilai t hitung variabel Pengendalian Internal (X_1) sebesar 0,157 < nilai t tabel yaitu 1,984 dan nilai sig yaitu 0,876 > 0,05, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Nilai t hitung variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X_2) sebesar 4,358 > nilai t tabel yaitu 1,984 dan nilai sig yaitu 0,001 < 0,05, maka

H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

3. Nilai t hitung variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_3) sebesar 2,108 > nilai t tabel yaitu 1,984 dan nilai sig yaitu 0,038 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
4. Nilai t hitung variabel Sistem Pelaporan (X_4) sebesar 0,949 < nilai t tabel yaitu 1,984 dan nilai sig yaitu 0,345 > 0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima, artinya variabel Sistem Pelaporan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
5. Nilai t hitung variabel Anggaran Daerah Berbasis Kinerja (X_5) sebesar -1,603 < nilai t tabel yaitu 1,984 dan nilai sig yaitu 0,112 > 0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima, artinya variabel Anggaran Daerah Berbasis Kinerja tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, didapatkan Nilai t hitung variabel Pengendalian Internal (X_1) sebesar $0,157 < \text{nilai } t \text{ tabel}$ yaitu 1,984 dan nilai sig yaitu $0,876 > 0,05$, maka **H_a ditolak** dan H_0 diterima, artinya variabel Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Temuan tersebut dapat dibenarkan oleh beberapa fakta di lapangan. Seperti pada setiap OPD implementasi dari pengendalian internal masih belum optimal, aparat pemerintah belum menyadari pentingnya pengendalian internal, serta adanya faktor eksternal yang mendominasi terhadap pembentukan akuntabilitas kinerja. Jalannya pengendalian internal juga tergantung dari kuatnya dukungan dari manajemen dan

budaya organisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ipan Nurhidayat, 2023).

4.4.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, didapatkan Nilai t hitung variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X_2) sebesar $4,358 > \text{nilai } t \text{ tabel}$ yaitu 1,984 dan nilai sig yaitu $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan **H_a diterima**, artinya variabel Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Kualitas sumber daya manusia didefinisikan sebagai kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas, akan tetapi tidak sekedar memiliki kapabilitas menuntaskan kewajibannya, namun juga sebagai bentuk meningkatkan kapasitas diri sendiri dan memotivasi peningkatan kapasitas rekan kerjanya (Map et al., 2019).

Pengaruh positif kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sesuai dengan *Stewardship Theory*. Pegawai yang memiliki kapabilitas memadai dan kemampuan intelek tinggi akan bersikap sebagai pelayan publik (*steward*) yang bertanggung jawab dan menjunjung nilai-nilai organisasi. Dalam hal ini sumber daya manusia yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Jawa Tengah telah diberikan pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab yang sesuai serta bekal pendidikan dan pelatihan yang mencukupi. Dengan

memaksimalkan kualitas sumber daya manusia maka akan berorientasi pada kepentingan organisasi sehingga kinerja yang akuntabel dapat tercapai (Budiani & Asyik, 2021). Hal tersebut juga mendorong *outcome* yang baik bagi pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azizah, 2020) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.4.3 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, didapatkan Nilai t hitung variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_3) sebesar 2,108 > nilai t tabel yaitu 1,984 dan nilai sig yaitu 0,038 < 0,05, maka H_0 ditolak dan **H_a diterima**, artinya variabel Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin jelas sasaran anggaran yang telah ditetapkan maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan alat bantu untuk mengukur sejauh mana anggaran telah ditetapkan secara jelas agar dapat menjadi indikator bagi pelaksana yang bertanggung jawab untuk mencapai *output* atau hasil yang diharapkan.

Pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sudah sejalan dengan *stewardship theory*. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk meraih tujuan organisasi dengan parameter sasaran kerja yang sudah ditentukan secara matang. Hal tersebut ditempuh dengan mengkaji nilai dan tujuan organisasi sehingga termotivasi dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Tindakan tersebut merupakan kesadaran atas pentingnya perencanaan penganggaran daerah serta sasarannya sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Maka dari itu dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, keberhasilan maupun kegagalan dari program kegiatan dari organisasi atau instansi dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah, sehingga dapat terciptanya akuntabilitas kinerja yang dapat dicapai.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Widaryanti & Pancawardani, 2020) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.4.4 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, didapatkan Nilai t hitung variabel Sistem Pelaporan (X_4) sebesar $0,949 < \text{nilai } t \text{ tabel}$ yaitu 1,984 dan nilai sig yaitu $0,345 > 0,05$, maka **H_a ditolak** dan H_0 diterima, artinya variabel Sistem Pelaporan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada kementerian/lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sehingga tidak sesuai dengan *Stewardship Theory*. Temuan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu prinsip akuntabilitas seperti ketepatan waktu, transparansi, dan keandalan informasi belum diimplementasikan dengan baik sehingga kualitas laporan yang dihasilkan belum optimal. Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat adanya kendala dari aplikasi baru yang menyebabkan pembuatan dari sistem pelaporan menjadi lambat dan kurang efisien sehingga tidak mendukung akuntabilitas kinerja. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Marsyela & Mia Ika Rahmawati, 2023).

4.4.5 Pengaruh Anggaran Daerah Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, didapatkan Nilai t hitung variabel Anggaran Daerah Berbasis Kinerja (X_5) sebesar $-1,603 <$ nilai t tabel yaitu 1,984 dan nilai sig yaitu $0,112 > 0,05$, maka **H_a ditolak** dan H_0 diterima, artinya variabel Anggaran Daerah Berbasis Kinerja tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran daerah berbasis kinerja merupakan perumusan anggaran daerah yang didasarkan pada pengeluaran dana yang penggunaannya melalui *output* dan *outcome* dengan pengeluaran tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan anggaran daerah berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tidak sesuai dengan *Stewardship Theory*. Hal tersebut disebabkan anggaran seringkali direncanakan pada pagu historis, tanpa dikaitkan dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa indikator kinerja yang terdapat pada Rencana Kas Anggaran (RAK) tidak selalu digunakan pada bulan yang direncanakan dan belum diimplementasikan sebagai dasar untuk evaluasi keberhasilan penggunaan anggaran. Artinya hal tersebut menyebabkan pengalokasian anggaran tidak mendorong akuntabilitas, karena hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) tidak berhubungan langsung dengan evaluasi yang nyata. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Marsyela & Mia Ika Rahmawati, 2023), dan (Mauliya et al., 2024).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan dari pengujian yang telah dilakukan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sehingga **hipotesis 1 ditolak**. Hal tersebut berdasarkan implementasi dari pengendalian internal masih belum optimal, aparat pemerintah belum menyadari pentingnya pengendalian internal, serta adanya faktor eksternal yang mendominasi terhadap pembentukan akuntabilitas kinerja..
2. Kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sehingga **hipotesis 2 diterima**. Hal tersebut karena dengan Pegawai yang memiliki kapabilitas memadai dan kemampuan intelek tinggi akan bersikap sebagai pelayan publik (*steward*) yang bertanggung jawab dan menjunjung nilai-nilai organisasi, sehingga kinerja yang akuntabel dapat tercapai.
3. Kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sehingga **hipotesis 3**

diterima. Hal tersebut disebabkan karena target kinerja telah ditentukan secara matang dari anggaran yang sudah ditetapkan.

4. Sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sehingga **hipotesis 4 ditolak**. Hal tersebut disebabkan prinsip akuntabilitas seperti ketepatan waktu, transparansi, dan keandalan informasi belum diimplementasikan dengan baik sehingga kualitas laporan yang dihasilkan belum optimal. Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat adanya kendala dari aplikasi baru yang menyebabkan pembuatan dari sistem pelaporan menjadi lambat dan kurang efisien sehingga tidak mendukung akuntabilitas kinerja.
5. Anggaran daerah berbasis kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sehingga **hipotesis 5 ditolak**. Hal tersebut disebabkan anggaran seringkali direncanakan pada pagu historis, tanpa dikaitkan dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa indikator kinerja yang terdapat pada Rencana Kas Anggaran (RAK) tidak selalu digunakan pada bulan yang direncanakan dan belum diimplementasikan sebagai dasar untuk evaluasi keberhasilan penggunaan anggaran.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berikut merupakan keterbatasan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga peneliti selanjutnya dapat meneliti pada Provinsi atau daerah lain.

2. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen. Peneliti selanjutnya dapat melibatkan variabel lain seperti sistem akuntansi, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan penyusunan laporan keuangan untuk mengetahui pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, maka terdapat saran sebagai berikut.

1. Bagi akademisi

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya dalam penelitian ini seperti sistem akuntansi, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan penyusunan laporan keuangan untuk mengetahui pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat memperluas lokus penelitian agar tidak fokus di Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi pemerintah daerah

Bagi pemerintah daerah diharapkan mampu lebih mengoptimalkan penerapan anggaran berbasis kinerja secara substansial. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya kerja yang baik, serta penguatan dalam penyempurnaan pengendalian internal dan sistem pelaporan. Selain itu, agar akuntabilitas kinerja dapat tercapai secara menyeluruh, perlu adanya konsistensi antara perencanaan, implementasi, dan evaluasi kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah. (2021). Pengaruh Good Governance pada Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Pengaruh Good Governance Pada Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah*, 2(1), 145–152.
- Alawiyah, S., Maharani, W. D., Sihotang, P. P., Hardiansy, A., Reza, M., & Anwar, S. (2024). *Model dan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pada PT XYZ*. 3, 8882–8897.
- Ananda Lubis, F. R., Junaidi, J., Lubis, Y., & Lubis, S. (2019). PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PELAKSANA DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (Persero). *Jurnal Agrica*, 12(2), 103.
<https://doi.org/10.31289/agrica.v12i2.2866>
- Arifin, S., & Sinambela, E. A. (2021). Studi Tentang Kinerja Karyawan Ditinjau Dari Keberadaan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal. *Realible Accounting Journal*, 1(1), 58–70.
<https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.136>
- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85–94.
<https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1850>
- Azizah, A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(1), 1–14.
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). No Title. *PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas SKPD Di Kabupaten Klat*, 19.
<https://jurnal.stieieu.ac.id/index.php/opt/article/view/213>
- Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. (2021). Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 35–56.
<https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.368>
- Budiani, L. V., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu*

- Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–20. www.surabaya.go.id
- Eksandy, A., Sari, R. U., & Rengganingsih, V. D. (2020). Business Strategy , Knowledge Management Dan Corporate Social. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, E-ISSN 2549-791X 93, 4(1), 80–93. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/2327>
- Erina, N. P. D., & Suartana, W. (2016). No Title. *PENGARUH PARTISIPASI PENGANGGARAN, PENEKANAN ANGGARAN, KAPASITAS INDIVIDU, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN PADA SENJANGAN ANGGARAN*, 15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/19509>
- Fadila, S. N., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten sidoarjo. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 1(Ppsp), 231–237.
- Febrianti, T., & Indrawati Yuhertiana. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 137–146. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i1.381>
- Fitriyani, N., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 19. <https://doi.org/10.32663/jaz.v2i2.989>
- Gunawan, I. B. A., & Sujana, E. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 824–837. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.64893>
- Ipan Nurhidayat. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>
- Karima, D., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(06), 10–24.
- Li, X., & Zhao, Z. (2024). Erratum: Corporate internal control, financial mismatch mitigation and innovation performance (PLOS ONE (2022) 17:12 (e0278633) DOI: 10.1371/journal.pone.0278633). *PLoS ONE*, 19(12 December), 316123. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316123>
- Manullang, S. B., & Abdullah, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pergantian Kepala SKPD Terhadap

Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(1), 1.

- Map, J., Winedar, S., Wibowo, N. M., & ÖÇİ, M. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi Dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Bhakti Sumekar Sumenep. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 2(03), 358–371. <https://doi.org/10.37504/map.v2i03.209>
- Marita, I., & Hariani, S. (2020). Hubungan Karakteristik Tujuan Anggaran Dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v2i1.145>
- Marsyela, R., & Mia Ika Rahmawati. (2023). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja , Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(8), 2–16.
- Mauliya, I., Haykal, M., Raza, H., & ... (2024). ... Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Pelaporan/Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *Jurnal Akuntansi* ..., 3(4), 551–570. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jam/article/view/17439%0Ahttps://ojs.unimal.ac.id/index.php/jam/article/download/17439/8135>
- Moersiya, R., & Huseno, T. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi*. 01(02), 147–159. <https://jurnal.stieieu.ac.id/index.php/opt/article/view/213>
- Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 192–212. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.463>
- Murjani. (2022). No Title. *PROSEDUR PENELITIAN KUANTITATIF*, 5. https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/1141/903?__cf_chl_tk=tzvL9JV4SIRbJRnpESJbgANi3IOUG__40nw_rbP48Ks-1737270594-1.0.1.1-rMPBIPcApmA58Q5OxLlS8pcg89uVX4sRZ0CoeelggWw
- Nurmin, & Masyita, S. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 1979, 111–118. <https://doi.org/10.70178/icbrj.v2i2.61>
- Oroh, T. B., Tinangon, J. J., Warongan, J. D., Ekonomi dan Bisnis, F., Akuntansi, J., kunci, K., Sasaran Anggaran, K., Anggaran, P., & Aparat Pemerintah, K. (2023). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran*

terhadap Kinerja Aparat Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara he Effect of Clarity of Budget Targets and Budget Participation on the Performance of Government Of. 7(4), 335–344.

Pratama, R. B. (2019). Metodologi Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 28–55.

Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 2(09), 1902–1908. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>

Saputra, A. W., Suwandi, M., & Suhartono. (2020). ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 40–55. www.kemenkeu.go.id

Selviani, D. (2020a). 703-Article Text-1055-2-10-20200709. *LAND Journal*, Volume 1(108–219).

Selviani, D. (2020b). No Title. *PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA CIMAHI*, 1(108–219). <https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/jurnalland/article/view/703>

Siahaan, S., & Simanjuntak, A. (2020). No Title. *PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH, PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Uta*, 6, 2. <https://media.neliti.com>

Simanjuntak, A., Siahaan, S. B., Situmorang, D. R., & Elisabeth, D. M. (2023). Factors Affecting Accountability Government Institution Performance. *Accounting Analysis Journal*, 12(2), 112–122. <https://doi.org/10.15294/aaj.v12i2.61983>

Sugiarti, K. P., Khasanah, H., Novitasari, N., & Putri, A. C. (2024). No Title. *LITERATURE REVIEW: AKUNTABILITAS DAN KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA*, 9. <https://ejournal.uncen.ac.id>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. <https://www.scribd.com/document/703487690/Sugiyono-2019>

Syahroni, M. I. (2022). No Title. *PROSEDUR PENELITIAN KUANTITATIF*, 2. <https://scholar.google.com/citations?user=znbnBKkAAAAJ&hl=id>

Widaryanti, W., & Pancawardani, N. L. (2020). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(2), 477–492. <https://doi.org/10.34152/fe.15.2.477-492>

- Wijayanti, R. P., & Setyawan, S. (2022). Litelature Review: Analisis Pengendalian Internal Dan Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi Sektor Publik. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.334>
- Yulia, A., & Ningsih, E. S. (2020). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 50–58. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15433>

